

SINOPSIS

Pada awal tahun 2018 ada lelang jabatan untuk 6 jabatan struktural eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 50 orang yang kemudian diseleksi melalui beberapa tahapan. Kemudian untuk Panitia Seleksi dipilih dari internal (Sekretariat Daerah) dan eksternal yang berasal dari akademisi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan tokoh masyarakat dengan syarat utamanya netralitas dan profesionalitas.

Pada Lelang Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 menggunakan metode kualitatif dengan data serta teori sebagai bahan penjas. Pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara dengan enam narasumber terkait sebagai data utama sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentasi sebagai data pendukung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan berjalan secara lancar sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, terbuka dengan cara dipublikasikan melalui media cetak maupun *online* jadi bagi masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait Lelang Jabatan. Hanya saja akumulatif nilai bagi tiap-tiap peserta menjadi privasi Panitia Seleksi. Setelah didapatkan 3 peserta Lelang Jabatan dengan nilai tertinggi pada tiap Instansi, direkomendasikan kepada Bupati untuk kemudian dipilih satu diantara tiga dengan penilaian secara pribadi diantara Bupati dan peserta dengan rekomendasi nilai tertulis dari Panitia Seleksi.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi terbuka juga didukung dari Indikator kompetensi dan profesionalitas serta 2 faktor pendukung, yaitu faktor Instansi atau Organisasi dan faktor Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaan Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 indikator utamanya adalah pada kompetensi dan pengalaman. Kompetensi dengan standar tertentu yang diterapkan kepada peserta sebagai acuan pertimbangan bagi Panitia Seleksi maupun Bupati didukung dengan pengalaman yang sudah dijalani peserta dalam lingkup kerja pemerintahan. Tidak ada masalah terkait keterlibatan politik maupun penyalahgunaan regulasi, namun hanya masalah waktu dengan jumlah peserta yang banyak sehingga proses Lelang Jabatan berjalan tidak sesuai jadwal. Pengumpulan data bisa dilakukan lebih awal atau bahkan terlambat dari yang sudah dijadwalkan. Untuk saat ini ada satu OPD yang belum berhasil dilantik sehingga masih dipimpin oleh seorang Plt dikarenakan ada masalah teknis serta membutuhkan pengkajian lebih dalam.

Kata Kunci : Manajemen Sumber Daya Manusia, Sistem Merit, Lelang Jabatan

